

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)

<http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jak>

Volume 23 Nomor 1, Januari 2018

PENGARUH KUALITAS DIPA DAN AKURASI PERENCANAAN KAS TERHADAP KUALITAS PENYERAPAN ANGGARAN

Heru Suwito¹

¹Program Studi Akuntansi FEB Universitas Lampung

Informasi Naskah

Update Naskah:

Dikumpulkan: 19 Sept 2017;

Diterima: 22 January 2018;

Terbit/Dicetak: 30 January 2018.

Abstract

Government faces economic problem continuously that affect the economic growth where the most impact occurred is from State Budget. The low absorption rate of government budget as seen from the realization of the state ministry/institutional budget hampers the rate of economic growth. The purpose of this study is to provide empirical evidence about the effect of DIPA quality and the accuracy of cash planning on the level of budget absorption of working unit in the working area of regional office of the Directorate General of Treasury, Lampung Province. The data used is secondary data in the form of data from the spending units which revised the budget and data on the planned withdrawal of the budget in the regional office of the Directorate General of Treasury, Lampung Province in 2013-2016. The sample of this study are working units who managed a budget of more than 10 billion on a quarterly basis during the period 2013-2016, with a total sample of 496 data studies. Hypothesis testing is performed using panel data regression Eviews version. The results of the study show that the quality of DIPA and accuracy of cash planning have a significant positive effect on the level of budget absorption of working units in the working area of regional office of the Directorate General of Treasury, Lampung Province.

Keywords:

Budget realization, DIPA quality, budget revision, cash planning

A. PENDAHULUAN

Presiden menghimbau kepada para menteri yang mendapatkan alokasi dana besar dari APBN harus mempercepat penyerapan anggaran pada awal tahun 2016 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta menjaga tidak terjadinya kontraksi. (Antara News, 2015 Desember 26). Parhusip (2008) menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2007, meskipun peran APBN terhadap PDB pada tahun tersebut relatif kecil namun APBN memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh *multiplier effect* dari realisasi APBN.

Volume APBN 2016 mencapai Rp2.095,7 triliun yang mana sebesar 37,4 persen dialokasikan melalui belanja K/L dan 36,7 persen ditransfer ke daerah dan alokasi Dana Desa, sisanya 25,8 persen melalui Bendahara Umum Negara. Agar tercapainya penyerapan anggaran yang tinggi pemerintah mengintruksi kepada para menteri dan kepala daerah untuk memangkas kendala administrasi yang dapat menghambat penyerapan anggaran.

APBN dalam ranah makro, juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dapat mengarahkan kondisi perekonomian dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jika pemerintah menurunkan target penerimaan atau menaikkan jumlah pengeluaran, hal ini akan mendorong tumbuhnya perekonomian, dan sebaliknya. Oleh karena itu, kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam penyusunan APBN selama ini adalah ekspansif dengan menerapkan defisit pada anggaran pada tingkat yang diperkirakan aman (UU No. 17 tahun 2003, maksimal 3% PDB) dalam menjaga kesinambungan fiskal.

Penyerapan anggaran yang merupakan masalah klasik yang sudah berlangsung lama dari tahun ke tahun, dan upaya-upaya percepatan penyerapan anggaran sebenarnya telah banyak dilakukan, akan tetapi memang belum memberikan dampak yang signifikan. Hal ini terjadi karena percepatan penyerapan anggaran tersebut sepenuhnya tergantung pada Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Keterlambatan dan ketidakpastian penyerapan anggaran berdampak pada titik optimalnya usaha penempatan dan investasi kas pemerintah. Pemerintah tidak akan mengambil resiko melakukan investasi apabila terdapat ketidakpastian penyerapan anggaran.

Faktor Penyebab rendahnya penyerapan anggaran adalah aspek dokumen pelaksanaan. Yaitu disebabkan karena dokumen DIPA yang masih memerlukan revisi. Hal ini berdasarkan hasil *survey* penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Juga didukung oleh pendapat dari Direktur Pelaksanaan Anggaran (Redaksi Media Keuangan dalam Seftianova;77).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) menunjukkan bahwa faktor perencanaan anggaran yang meliputi pemblokiran kegiatan anggaran serta diperlukannya revisi DIPA dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Meliasih (2012), bahwa Pejabat Pengelolaan Anggaran yang tercantum dalam DIPA terdapat perubahan sehingga harus dilakukan revisi anggaran yang mengakibatkan keterlambatan penyerapan anggaran pemerintah.

Penulis meneliti penyerapan belanja pemerintah secara keseluruhan terkecuali belanja pegawai, faktor perencanaan anggaran mencakup permasalahan seperti kurangnya waktu bagi satker dalam penyusunan dan penelaahan anggaran, perencanaan anggaran untuk pembangunan fisik yang masih memerlukan revisi, adanya pagu anggaran yang diblokir, satker sering mengabaikan jadwal perencanaan penarikan dana dalam DIPA, seringnya terjadi mutasi pejabat pengelola keuangan turut memperburuk faktor perencanaan dalam penyerapan anggaran.

Pada halaman 3 DIPA tercantum besarnya rencana penarikan dana per bulan dari pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Menteri/Ketua Lembaga. Berdasarkan besarnya rencana penarikan dana tersebut Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) harus menyiapkan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna anggaran tersebut. Apabila dana yang

tersedia di Rekening Kas Umum Negara tidak mencukupi kebutuhan dari pengguna anggaran, maka Bendahara Umum Negara akan melakukan usaha diantaranya dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), penjualan aset negara, pinjaman likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman masyarakat melalui perbankan atau usaha-usaha lainnya. Maka dari aktifitas itu ketika pemerintah telah memperoleh sejumlah dana dan pada saat itu juga pemerintah menanggung beban bunga. Apabila dana tersebut tidak jadi dipergunakan dikarenakan tertundanya penyerapan anggaran oleh pengguna anggaran, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya *idle cash* pada rekening pemerintah. Apabila jumlah *idle cash* sangat besar, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen kas pemerintah yang baik. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Van Horne (1986:193), bahwa manajemen kas mengandung pengertian mengelola uang perusahaan sedemikian rupa sehingga saat dicapai ketersediaan kas maksimum dan pendapatan bunga yang maksimum dari uang tunai yang menganggur.

Pada Wokshop Perencanaan kas yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan di Yogyakarta tahun 2011 bahwa komitmen bersama semua stakeholder, mulai dari pimpinan dan pelaksana teknis kegiatan, untuk tidak sebatas mengimplementasikan perencanaan kas, tetapi juga menjaga akurasi perencanaan kas sehingga penyerapan anggaran menjadi semakin berkualitas. Sampai kini perencanaan kas dirasa belum memadai karena belum cukupnya tingkat partisipasi satuan kerja yang merupakan ujung tombak pengguna uang negara.

Berdasarkan penelitian yang diungkapkan oleh Herriyanto (2012) mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai jadwal perencanaan kas yang tertera di halaman III DIPA dapat menghambat penyerapan anggaran. Dalam penyusunan perencanaan anggaran kas yang tertera di halaman III DIPA harus disusun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal kebutuhan pelaksanaan anggaran sehingga menghasilkan kualitas perencanaan kas yang baik, apabila terjadi kesalahan jadwal penarikan dana untuk menompang kegiatan tertentu maka harus dilakukan revisi DIPA hal ini yang memakan waktu yang dapat menghambat proses penyerapan anggaran pemerintah.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dan Kualitas Penyerapan Anggaran

DIPA merupakan hasil dari penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga atau sering disebut RKA-KL yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) berkaitan erat dengan perencanaan anggaran. Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh satker Kementerian Negara/Lembaga maka semakin baik pula kualitas DIPA tersebut. Kualitas DIPA antara lain ditunjukkan dengan ketepatan waktu dalam menerima DIPA, tidak adanya kesalahan di dalam DIPA, tidak diperlukannya revisi anggaran, tidak adanya tanda bintang (Seftianova: 2013).

Kementerian Keuangan mencatat beberapa penyebab mendasar rendahnya penyerapan anggaran (BPKP:2011) diantaranya adalah: proses persiapan pelaksanaan anggaran yang tidak matang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (DHP RDP BUN), dan disahkan oleh Menteri Keuangan.

Waktu penelaahan dokumen RKA-K/L ini sangat terbatas sehingga pembahasan isi dokumen RKA-K/L tidak dilakukan secara terperinci memungkinkan terjadinya kesalahan pembebanan

anggaran, dan memungkinkan terjadinya pemblokiran anggaran/tanda bintang pada suatu kegiatan dikarenakan dokumen pendukung tidak lengkap. Hal tersebut berdampak terhadap kualitas dokumen DIPA yang dihasilkan dikarenakan adanya kesalahan pembebanan, kesalahan tata naskah dalam RKA-K/L, pembukaan pemblokiran/tanda bintang sehingga diperlukannya revisi DIPA yang dapat menghambat realisasi penyerapan anggaran.

KPPN Bandung I melakukan evaluasi guna mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran dengan cara menghimbau kepada seluruh satker untuk mengisi kuesioner web penyerapan anggaran yang telah disiapkan oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Dari hasil analisis kuesioner ada beberapa faktor utama penyebab rendahnya penyerapan anggaran diantaranya adalah perencanaan anggaran hal ini disebabkan adanya kesalahan penentuan akun sehingga perlu revisi dokumen pelaksanaan anggaran, anggaran kegiatan yang diblokir, masa penelaahan terlalu pendek sehingga belum siap data pendukung, penyusunan pagu anggaran terlalu rendah, penentuan harga satuan barang yang ditetapkan masih terlalu rendah/tinggi, tidak menganggarkan admistrasi pengadaan, perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan dan adanya penyesuaian harga karena kebijakan pemerintah.

Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam acara Workshop Perencanaan Kas di Yogyakarta menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi laju penyerapan anggaran adalah dokumen DIPA yang masih memerlukan revisi (Redaksi Media Keuangan: Oktober 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Rozai dan Subagiyo (2015) menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran yang tidak matang sering menyebabkan anggaran belanja harus direvisi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) menunjukkan bahwa faktor perencanaan anggaran yang meliputi pemblokiran kegiatan anggaran serta diperlukannya revisi DIPA dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Seftianova (2013) bahwa kualitas perencanaan DIPA berpengaruh positif terhadap kualitas penyerapan anggaran. Dari hasil penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

H1: Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) berpengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Akurasi Perencanaan Kas dan Kualitas Penyerapan Anggaran

Pada masa lalu tujuan utama pengelolaan kas adalah menyediakan dana yang cukup untuk belanja sehingga sejak awal tahun pemerintah sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya proyeksi penerimaan dan penarikan dana, ditambah lagi tidak adanya kesadaran akan konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*), menyebabkan banyak *opportunity cost* karena uang tidak dimanfaatkan. Dalam pelaksanaan APBN secara teknis perencanaan kas adalah suatu kewajiban bagi Kementerian/Lembaga dimana perencanaan tersebut akan digunakan sebagai bahan/sumber data bagi perencanaan kas pemerintah pusat. Kewajiban tersebut dilaksanakan dengan penyampaian laporan perkiraan penyetoran dana dan perkiraan penarikan dana secara periodik (bulanan, mingguan, dan harian) oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran kepada kuasa bendahara umum negara. Laporan tersebut nantinya akan dikompilasi dan disusun menjadi perencanaan kas pemerintah. Pada halaman 3 DIPA tercantum besarnya rencana penarikan dana per bulan dari pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Menteri/Ketua Lembaga. Berdasarkan besarnya rencana penarikan dana tersebut Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) harus menyiapkan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna anggaran tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2015 tanggal 31 Desember 2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas, diturunkannya Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-3624/PB.3/2015 tanggal 4 Mei

2015 hal Penggunaan Aplikasi Perencanaan Kas 2015 disampaikan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) harian yang memuat tanggal penarikan dana, jenis belanja dan jumlah nominal penarikan kepada KPPN untuk rencana pengajuan semua jenis SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penarikan dana yang identik dengan penyerapan anggaran sangat berpengaruh terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) atau perencanaan kas satuan kerja.

Perencanaan Kas menjadi sangat penting dalam upaya percepatan penyerapan anggaran, karena perencanaan kas yang baik dan andal akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai kegiatan pemerintah. Hal ini tentunya dapat mencegah kemungkinan terhambatnya suatu kegiatan akibat dari tidak tersedianya dana (Sihombing & Widhiyanto: 2008). Kementerian Keuangan mencatat beberapa penyebab mendasar rendahnya penyerapan anggaran (BPKP, 2011;7) diantaranya adalah penyusunan rencana penarikan dana yang kurang akurat. Tingkat akurasi perencanaan kas yang tinggi dapat berdampak pada penyerapan anggaran yang proporsional, tidak terjadi penumpukan pencairan dana di akhir tahun (Yudhiyanto: 2011). Penelitian yang dilakukan Herriyanto (2012) mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai jadwal perencanaan kas yang tertera di halaman III DIPA dapat menghambat penyerapan anggaran. Haryanto dan Wihascaryo (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat akurasi penarikan dana yang rendah akan menyebabkan penumpukan pada anggaran yang tidak dicairkan tepat pada waktunya.

Tingkat akurasi perencanaan yang dilakukan dengan realisasi penyerapan perbulan perlu menjadi perhatian sebagai dasar pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, jadi bukan hanya mengacu pada besaran dana secara total sehingga dapat menciptakan kualitas penyerapan anggaran yang lebih baik. Dari hasil penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

H2: Akurasi perencanaan kas berpengaruh positif terhadap kualitas penyerapan anggaran.

C. METODE PENELITIAN

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa teori literatur, penelitian terdahulu, hasil evaluasi pemerintah dan hasil penelusuran angka-angka dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung berupa data Satuan kerja yang ada dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung secara triwulan dari tahun 2013 s/d 2016.

Pemilihan sampel penelitian dikategorikan melalui beberapa kriteria yaitu data yang selalu ada ditahun penelitian 2013 sampai dengan 2016 secara triwulan. Jumlah sampel penelitian yang baik berjumlah 30 s/d 500 (Roscoe dalam Sekaran, 1992:252) oleh karena itu peneliti mengambil sampel sebanyak 496 dimulai dari pagu anggaran yang terbesar. Alasan peneliti mengambil pagu anggaran yang terbesar dikarenakan dapat mempengaruhi proporsi realisasi anggaran dan diindikasikan sering melakukan revisi anggaran. Jumlah sampel yang dipilih sebanyak 496 memiliki pagu anggaran lebih dari Rp. 10 Milyar.

Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu satu variabel dependen berupa kualitas penyerapan anggaran dan dua variabel independen yang terdiri atas kualitas DIPA dan akurasi perencanaan kas.

Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) adalah tingkat baiknya perencanaan DIPA dibuat untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Pengukuran kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dalam kaitannya dengan pencairan anggaran dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Bandar Lampung yang berupa seberapa sering satker

melakukan revisi DIPA. Semakin sering satker melakukan revisi DIPA menunjukkan kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) yang rendah/buruk dan sebaliknya semakin jarang sampai dengan tidak pernah melakukan revisi DIPA menunjukkan kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) tinggi/baik.

Akurasi perencanaan kas adalah tingkat ketepatan/kesesuaian antara perencanaan kas dengan realisasi anggaran yang terjadi. Pengukuran konsep akurasi perencanaan kas ini dilakukan dengan mengukur nilai deviasi antara perkiraan dengan nilai Surat Perintah Membayar (SPM) satker yakni membandingkan jumlah perkiraan penarikan dana dengan nilai SPM pada periode dimaksud. Perhitungan deviasi perkiraan penarikan dana menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN (Seftianova:2013), dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai SPM Satker} - \text{Jumlah perkiraan penarikan dana}}{\text{Jumlah perkiraan penarikan dana}} \times 100\%$$

Tingkat penyerapan anggaran didefinisikan sebagai suatu ukuran seberapa besar anggaran yang telah direalisasikan dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam persentase. Rumus yang digunakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE - 32/MK.1/2015 sebagai berikut:

$$\% \text{ Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Belanja Barang \& Belanja Modal}}{\text{Pagu Belanja Barang dan Modal}} \times 100\%$$

Analisis Data

Teknis analisis penelitian ini adalah analisis data panel. Data panel merupakan penggabungan dari data *time series* dan *cross section*. Data *time series* berupa data triwulan yang dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dan data *cross-section* yaitu 31 satker yang telah melalui kriteria penyampelan data. Pengolahan data penelitian ini akan menggunakan alat uji statistik *evIEWS 8*, hasilnya kemudian dilakukan analisis sehingga diperoleh temuan-temuan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan analisis regresi linear berganda menggunakan *EvIEWS 8*. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan $\alpha = 5\%$ maka persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dimana:

$$Y_{it} = a - a_1X1_{it} + a_2X2_{it} + \varepsilon_{it}$$

- Y = Tingkat penyerapan anggaran
- a = konstanta
- X1 = Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA)
- X2 = Akurasi perencanaan kas
- i = Satker
- t = Periode
- ε = *residual error*
- a1-a2 = Koefisien parameter

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum dari data yang digunakan. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel satker – satker yang memiliki pagu anggaran lebih dari Rp. 10 Milyar. Satker yang mengelola pagu anggaran besar menjadi konsentrasi khusus pemerintah dikarenakan memiliki proporsi yang besar terhadap penyerapan anggaran secara keseluruhan serta diindikasikan sering melakukan revisi anggaran. Periode datanya diambil secara triwulan pada tahun 2013 sampai dengan 2016 pada satker – satker di wilayah kerja Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan per triwulan di setiap tahunnya dengan jumlah satker yang diteliti 31 satker sehingga data penelitian yang dilakukan sebanyak 496 data observasi.

Tabel di bawah ini menunjukkan statistik deskriptif atas variabel-variabel pada permodelan panel data atas penelitian ini. Uji normalitas dapat dilakukan untuk mengetahui apakah residualnya telah terdistribusi secara normal.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Penyerapan Anggaran

	Penyerapan Anggaran (%)	Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA)/Jumlah revisi	Perencanaan Kas (%)
Mean	22,65946	2,328629	1,027097
Median	21,55500	2,000000	-15,26500
Maximum	83,30000	8,000000	685,2500
Minimum	0,000000	0,000000	-100,0000
Jarque-Bera	43,68577	40,86319	4742,789
Probability	0,000000	0,000000	0,000000
Observations	496	496	496

Sumber: Hasil output data panel Eviews 8

Pemilihan Model Regresi Panel Data

Permodelan dalam menggunakan teknik regresi panel data dapat menggunakan tiga pendekatan alternatif metode dalam pengolahannya. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah (1) *Metode Common Effect*, (2) *Metode Fixed Effect Model (FEM)*, dan (3) *Metode Random Effect Model (REM)*.

Pengujian model untuk menentukan model yang terbaik dari model *common effect* dan *fixed effect* dilakukan uji *Chow*. Hasil uji *Chow* dapat dilihat bahwa nilai $P\text{-value Chi-square} < \alpha = 5\%$. Ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak sehingga model yang terbaik menggunakan *fixed effect model*. Dari hasil uji *Chow* kemudian dapat dilanjutkan pada uji *Hausman* untuk mengetahui manakah model yang terbaik antara *fixed effect model* dengan *random effect model*. Nilai *Chi-Square* yang dihasilkan dari uji *Hausman* lebih besar dari nilai *Chi-Square* Tabel ($41,4911 > 5,991$) dengan dua *degree of freedom* dan $P\text{-value Chi-square} < \alpha = 5\%$ kita dapat mengambil keputusan untuk menggunakan *Fixed Effect Model*.

Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) (X1) dan akurasi perencanaan kas (X2), sedangkan variabel dependennya adalah tingkat penyerapan anggaran (Y). Pada Tabel 4.5 disajikan hasil regresi data panel variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)

Tabel 2. Hasil Regresi Data Panel dengan Metode Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.07914	0.902614	11.16661	0.0000
-X1?	-5.370729	0.316616	-16.96292	0.0000
X2?	0.071930	0.006177	11.64399	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
1--C	-3.934559			
2--C	2.364263			
3--C	-6.591476			
4--C	4.865676			
5--C	-2.589526			
6--C	-10.55385			
7--C	4.359013			
8--C	-2.284533			
9--C	2.304550			
10--C	3.528344			
11--C	4.002637			
12--C	-2.010396			
13--C	-3.119611			
14--C	1.546894			
15--C	2.086427			
16--C	5.834151			
17--C	4.709210			
18--C	5.872359			
19--C	0.986596			
20--C	1.905671			
21--C	0.062408			
22--C	-2.387387			
23--C	-0.916529			
24--C	-3.360723			
25--C	-4.551489			
26--C	-1.420480			
27--C	0.174100			
28--C	4.087146			
29--C	-0.981514			
30--C	-5.341186			
31--C	1.353820			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.468180	Mean dependent var		22.65946
Adjusted R-squared	0.431423	S.D. dependent var		15.35521
S.E. of regression	11.57845	Akaike info criterion		7.800383
Sum squared resid	62069.98	Schwarz criterion		8.080256
Log likelihood	-1901.495	Hannan-Quinn criter.		7.910243
F-statistic	12.73733	Durbin-Watson stat		1.750731
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: hasil output data panel evIEWS 8

Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan Eviews 8 pada Tabel 4.8 diatas maka didapat persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 10.0791409721 - 5.37072901138(-X1) + 0.0719300990976(X2)$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

1. Konstanta α sebesar 10,0791 menyatakan bahwa tanpa adanya variabel kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dan akurasi perencanaan kas nilai tingkat penyerapan anggaran sebesar 10,0791%.
2. Nilai koefisien regresi kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) ($X1$) memiliki hubungan negatif (5,3710) artinya setiap penurunan kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dengan ukuran 1 kali melakukan revisi anggaran maka tingkat penyerapan anggaran akan mengalami penurunan sebesar 5,371% dengan asumsi variabel-variabel lainnya dianggap tetap.
3. Nilai koefisien regresi akurasi perencanaan kas ($X2$) memiliki hubungan positif sebesar 0,072 artinya setiap meningkatnya 1% tingkat deviasi dari akurasi perencanaan kas maka tingkat penyerapan anggaran akan mengalami kenaikan sebesar 0,072% dengan asumsi variabel-variabel lainnya dianggap tetap.

Hipotesis satu ($H1$) dari penelitian ini menduga terdapatnya pengaruh negatif kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) terhadap tingkat realisasi anggaran. Berdasarkan pada hasil pengujian regresi data panel dari Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa berdasarkan atas uji t dengan hasil p-value $< \alpha = 0,05$ yaitu $0,0000 < 0,05$ bahwa H_a diterima, dengan menggunakan sampel data panel sebanyak 496 observasi dimana variabel kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Seringnya satker melakukan revisi anggaran dapat menghambat tingkat penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Seftianova (2013) yang menjelaskan bahwa kualitas perencanaan DIPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Penelitian ini juga mendukung evaluasi penyerapan anggaran yang dilakukan oleh KPPN Bandung I berupa hasil analisis kuesioner ada beberapa faktor utama penyebab rendahnya penyerapan anggaran diantaranya adalah perencanaan anggaran hal ini disebabkan adanya kesalahan penentuan akun sehingga perlu revisi dokumen pelaksanaan anggaran, anggaran kegiatan yang diblokir, masa penelaahan terlalu pendek sehingga belum siap data pendukung, penyusunan pagu anggaran terlalu rendah, penentuan harga satuan barang yang ditetapkan masih terlalu rendah/tinggi, tidak menganggarkan admistrasi pengadaan, perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan dan adanya penyesuaian harga karena kebijakan pemerintah.

Hipotesis dua ($H2$) dari penelitian ini menduga bahwa terdapat pengaruh positif akurasi perencanaan kas terhadap tingkat penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa akurasi perencanaan kas menghasilkan p-value $< \alpha = 0,05$ yaitu sebesar $0,0000 < 0,05$ bahwa H_a dapat diterima, maka dengan menggunakan sampel data panel sebanyak 496 observasi dalam 4 tahun akurasi perencanaan kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Seftianova (2013) yang menyatakan bahwa akurasi perencanaan kas tidak berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hipotesis ini sejalan dengan kesimpulan dari workshop perencanaan kas yang diadakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan di Yogyakarta yang menyatakan bahwa semakin meningkatnya akurasi perencanaan kas maka semakin baik kualitas penyerapan anggaran.

Analisis Individual Effect

Berdasarkan pada pengujian model *Fixed Effect* yang terdapat pada Tabel 4.8 bahwa nilai koefisien *Fixed Effect* dari hasil estimasi regresi model penelitian menerangkan ada 17 satuan kerja yang memiliki intersep positif dan 14 satuan kerja yang memiliki intersep negatif. Satuan kerja yang memiliki nilai intersep positif 0 s/d 2 adalah Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Timur, Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Lampung, Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Lampung, SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Mesuji-Lampung, dan ROSATPRAS Polda Lampung. Satuan kerja tersebut memiliki nilai penyerapan anggaran rata-rata sebesar 32,42% , revisi anggaran rata-rata dilakukan sebanyak 1,6 kali dan rata-rata nilai deviasi akurasi perencanaan kas sebesar 114,56%. Satuan kerja yang memiliki nilai intersep negatif 0 s/d -2 adalah satker Pelaksanaan Jalan Nasional I Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dan satker Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandar Lampung. Satuan kerja tersebut memiliki nilai rata-rata penyerapan anggaran sebesar 11,27%, revisi anggaran rata-rata dilakukan sebanyak 4,3 kali, dan rata-rata tingkat deviasi akurasi perencanaan kas sebesar -70,76%. Berdasarkan contoh tersebut peneliti menganalisis bahwasannya terdapat pengaruh antara kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dengan melihat jumlah revisi yang dilakukan dan perencanaan kas berpengaruh terhadap tingkat realisasi penyerapan belanja satker. Fenomena tersebut dikarenakan perencanaan didalam penyusunan anggaran satker yang masih kurang baik sehingga diperlukan revisi anggaran disaat tahun anggaran berjalan. Tidak adanya kesesuaian antara program kerja anggaran dengan kebutuhan yang sebenarnya, dokumen pendukung yang tidak lengkap berakibat diblokirnya pagu anggaran dapat mengakibatkan terjadinya revisi DIPA. Satker Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung melakukan 6 kali revisi anggaran maka proses pelaksanaan anggaran tidak dapat dilaksanakan menunggu hasil dari revisi anggaran, sehingga tingkat realisasi penyerapan anggaran menjadi rendah sebesar 11,10%. Perencanaan kas satker Badan Pusat Statistik dengan tingkat deviasi sebesar -77,18% ini menerangkan bahwa rencana penarikan dana yang telah disusun tidak dapat terealisasi secara keseluruhan, yaitu dari pagu rencana penarikan hanya terealisasi sebesar 22,82%. Penjelasan ini juga menerangkan bahwa tidak akuratnya didalam perencanaan kas berdampak pada tingkat penyerapan anggaran.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis, dapat diketahui kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) yang diukur dengan banyaknya revisi anggaran yang dilakukan dapat mempengaruhi tingkat realisasi penyerapan anggaran dengan nilai koefisien sebesar (5,371). Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) yang baik akan mencegah terjadinya revisi anggaran yang dapat menghambat tingkat realisasi penyerapan anggaran satker.

Pada variabel akurasi perencanaan kas juga mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran satuan kerja kementerian/lembaga yang signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,072. Hasil analisis ini dapat mendukung bahwa akurasi perencanaan kas dapat mempengaruhi tingkat realisasi anggaran satuan kerja kementerian/lembaga sehingga satuan kerja sebagai ujung tombak tingkat penyerapan anggaran memandang penting dalam menyusun rencana penarikan dana.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa saran yang penulis ingin ajukan, diantaranya adalah:

1. Perlu adanya perhatian oleh pimpinan satker kepada petugas penyusun anggaran untuk dapat benar-benar memperhatikan isi dari kebenaran dokumen RKA-KL yang menjadi pedoman

dokumen DIPA sehingga dapat menekan tingkat kesalahan dokumen yang mengakibatkan terjadinya revisi DIPA yang dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

2. Dengan hasil penelitian bahwa akurasi perencanaan kas dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran diharapkan satker dalam menyusun rencana penarikan dana harus benar-benar sesuai dengan anggaran yang akan terealisasi dengan mengacu pada jadwal program kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Bagi pelaksana kegiatan agar dapat menjalankan program kerjanya sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sehingga terjaga keakurasian perencanaan kas yang telah disusun.
4. Diperlukan adanya suatu regulasi yang dapat meningkatkan kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dan akurasi perencanaan kas satker yang disusun dengan memberikan *reward* bagi satker yang tepat dalam perencanaan kasnya dan paling sedikit melakukan revisi serta memberikan *punishment* bagi satker yang tidak tepat dalam perencanaan kasnya dan terbanyak dalam melakukan revisi DIPA

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian diantaranya adalah:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya berjumlah 31 objek penelitian dari data yang sebenarnya sebanyak 603 objek dengan kriteria pemilihan objek penelitian adalah satker yang selalu ada di tahun penelitian serta pagu anggaran diatas Rp. 10 Milyar.
2. Penelitian ini hanya menguji dua variabel yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa 46,82% kedua variabel tersebut mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran dan 53,18% dari faktor lainnya.

REFERENSI

- Agus, P., SST., Ak., M. Ak. Kunci Kualitas Pelaksanaan Anggaran: Persiapan Memadai. Publikasi Karya Tulis Widyaiswara Balai Diklat Keuangan. diunduh melalui webside: <http://www.bppk.depkeu.go.id>. Desember 5, 2016.
- Antara News. Percepatan Realisasi. diunduh melalui webside: <http://www.antaraneews.com>. November 25, 2016.
- Bastian, Indra. (2008). Keterlambatan APBD Dalam Analisa Siklus. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 7 No. 2: 115-130.
- BPKP. (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review. diunduh melalui webside: www.bpkp.go.id. November 28, 2016.
- Governance Global Practice. (2015). Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. diunduh melalui webside: <http://documents.worldbank.org/curated/Desember5>, 2016.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain. Erlangga. Jakarta.
- Haryanto, J D. Wihascaryo, AB. (2011). Evaluasi Penerapan Perencanaan Kas di Tingkat Satuan Kerja. Jakarta: Sub Bagian Pengembangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. diunduh melalui webside: <ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id>. Desember 5, 2016.
- Herryanto, H. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Jakarta. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Juliani, D. dan Sholihin, M. (2014). Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 11 No. 2: 177-199.
- KPPN Bandar Lampung. (2016). SPAN. diunduh melalui website :

<http://www.kemenkeu.go.id/Layanan/online-monitoring-span>. November 21, 2016.

- Kuncoro, E D. (2013). Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi SiPP Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah. I Dinas PU Prov. Kaltim. *eJournal Administrasi Bisnis* Vol.1 No.4: 364-373.
- Mardiasmo.(2007).*Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Andi Offset
- Miliasih, R. (2012). Analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan kerja kementerian negara/lembaga tahun anggaran 2010 diwilayah pembayaran KPPN Pekanbaru. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Muthohar, Aziz. (2012). Faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektifitas perencanaan kas pada satuan kerja kementerian/lembaga dalam lingkup wilayah pembayaran KPPN Jakarta II. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Munandar, M. (2001). *Budgeting. Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Edisi 1. Cetakan 14 BPFE: Yogyakarta
- Murwanto, R. Insyafiah. dan Subkhan. (2006). *Manajemen Kas Sektor Publik*. Jakarta:Departemen Keuangan RI.
- Mu, Yibin. (2006). *Government Cash Management:Good Practice and Capacity-Building Framework*. Financial Sector. The World Bank.
- Noviwijaya, A. dan Rohman, A. Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja. *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol. 2 No. 3: 1-10.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN
- Parhusip, B. (2008). Tinjauan Umum Realisasi APBN Tahun 2007 Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Agregat. *Jurnal Ekonomi* Vol. 13 No. 1: 27-39.
- Rozai, M A. dan Subagio L. (2015). Optimalisasi Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia* Vol. 9 No. 1: 72-89.
- Redaksi Media Keuangan.(2011). *Tingkatkan Capaian Kinerja*. Media Keuangan Vol. VI No. 50. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. diunduh melalui webside: www.kemenkeu.go.id. Desember 19, 2016.
- Sekaran, Uma. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta.
- Seftianova, R. dan Adam H. (2013). Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* Vol.4 No.1: 75-84.
- Shochrul R, Ajija, dkk. 2011.Cara Cerdas Menguasai Eviews. Salemba Empat. Jakarta.
- Sihombing, P W. dan Widhiyanto, I. (2008). Modul Perencanaan Kas: Revisi 3. Jakarta: Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-3624/PB.03/2015 perihal Penggunaan Aplikasi Perencanaan Kas 2015.
- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 32/MK.1/2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Utama Penyerapan dan Pencapaian Output Belanja Di Lingkungan Kementerian Keuangan. diunduh melalui webside: <ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id>. Mei 16, 2017.
- Taufik, M. Darwanis. dan Fahlevi H. (2016). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Belanja Modal. *Jurnal Magister Akuntansi* Vol. 5 No. 1:

10-20.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. diunduh melalui webside: <http://www.bpk.go.id>. Desember 5, 2016.
- Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. diunduh melalui webside: <http://www.bpk.go.id>. Desember 5, 2016.
- Van Horne, J C dan Wachowicz J M. (2005). *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua belas. Jakarta: Salemba Empat.
- Welsch, Hilton, Gordon. 2000. *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Wibisono, Yusuf. 2005. *Metode Statistik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrik Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga. EKONISIA. Yogyakarta.
- Winarno, Wing Wahyu. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Edisi Empat. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Yudhiyanto, Hendy S. 2011. Akuratnya Perencanaan Kas, Berkualitasnya Penyerapan Anggaran. diunduh melalui webside: www.djpbk.kemenkeu.go.id. Desember 5, 2016.